Pemerintah Kota Pasuruan
Dinas Sosial

2026

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL



(0343)423628

dinassosialpasuruan@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DaerahTugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 5

2.2 Pokok-pokok Materi Yang Disajikan dalam Bab Ini 23

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

2.5 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 28

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 47

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 51

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB 5 PENUTUP 78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025 Kota Pasuruan 11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan 26
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan..... 30
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan 51
Tabel 3.2 Tujuan Dinas Sosial 51
Tabel 3.3 Sasaran Dinas Sosial..... 52
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial..... 52
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan 55

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan mempunyai tugas tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan perencanaan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
3. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
4. pelaksanaan pelayanan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
5. pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi,dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin;
6. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial serta penanganan fakir miskin; dan
7. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Sosial.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026, adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pasuruan;
14. Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2026.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah untuk menjadi pedoman perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan dan untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026, adalah:

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DaerahTugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja program dan kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 telah dilewati. Berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi yang tercapai sesuai target terealisasi 100%. Pada Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memiliki target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen, Pada Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki target 5 dokumen terealisasi 5 dokumen, Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah memiliki target 1 Laporan dengan realisasi 1 Laporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu yang tercapai sesuai target terealisasi 100%.
c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu yang tercapai sesuai target terealisasi 100%.
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Persentase SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya tercapai sesuai target terealisasi 100%.
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran tercapai sesuai target terealisasi 100%.
f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah tercapai sesuai target terealisasi 100%.
g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai 55,56% dari target karena pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat hanya tercapai 100 laporan dari target 191 laporan.
h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara tercapai 81,08% dari target.

2. Program Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin

Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan dan Persentase PSKS yang Aktif. Adapun target kinerja Program Pemberdayaan Sosial sebesar 100% dan 87%, realisasi kinerja program sebesar 100% dan 87% dan persentase capaian sebesar 100%, dengan rincian :

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota dengan indikator Persentase PSKS yang

meningkat kapasitasnya tercapai sesuai target terealisasi 100%. Dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota dengan indikator Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 108 Orang, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota dengan indikator Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 4 orang, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota dengan indikator Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 1087 KPM, sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota dengan indikator Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 5 lembaga.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar. Adapun target kinerja Program Rehabilitasi Sosial sebesar 9,2% dengan realisasi kinerja program sebesar 12,79% dan persentase capaian sebesar 139,02%, dengan rincian :

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan indikator Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial tercapai 87,14% dari target 80%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah PPKS yang mendapat layanan sosial sebanyak 122 orang meliputi 80 PPKS terlantar yang dilayani dan 42 pembinaan PPKS Pengemis denganjumlah total PPKS sebanyak 140 orang.
b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar

Panti Sosial dengan indikator Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial tercapai 59,76% dari target 35,62% Capaian ini berdasarkan data Jumlah PPKS lainnya yang mendapat layanan sosial sebanyak 1855 orang dengan jumlah total PPKS lainnya 3104 orang.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah Persentase DTKS yang di update. Adapun target kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 3.31% dengan realisasi kinerja program sebesar 11.32% dan persentase capaian sebesar 354,08%, dengan rincian :

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota dengan indikator Persentase DTKS yang di update sudah tercapai 100% sesuai target berdasarkan jumlah data yang terverifikasi sebanyak 6.871 data dibandingkan Jumlah Data DTKS sebanyak 58.585 data.

5. Program Penanganan Bencana

Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana adalah Persentase Korban bencana yang tertangani. Adapun target kinerja Program Penanganan Bencana sebesar 60% dengan realisasi kinerja program sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100%, dengan rincian :

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota dengan indikator Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar dengan target sebesar 60% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan data Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan kebutuhan dasar sebanyak 5.850 dibandingkan Jumlah permintaan permakanan sebanyak 5.850. Ketercapaian indikator ini didukung oleh terpenuhinnya permintaan permakanan pada saat bencana banjir di bulan April 2024 dan Desember 2024.
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota dengan indikator Persentase taruna siaga bencana yang aktif dengan target 100% terealisasi 100% atau capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan

Taruna siaga bencana yang aktif 48 Orang dengan jumlah total Taruna Siaga Bencana 48 Orang.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Adapun target kinerja Program Penanganan Bencana sebesar 100% dengan realisasi kinerja program sebesar 100% dan persentase capaian sebesar 100%, dengan rincian:

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota memiliki indikator Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 100%. Capaian ini berdasarkan Jumlah Taman makam yang dipelihara 254 makam dari jumlah makam yang ada yaitu 254 makam.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2025 Kota Pasuruan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2025	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	`06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1	`06	`01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34%
1	`06	`01	`2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	23,33 %
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	4 Laporan	10,00 %
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	`06	`01	`2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	100%	26 Orang	26 Orang	100,00 %

1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	17 Laporan	10 Laporan	66,67 %
1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
1	`06	`01	`2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	70,00 %
1	`06	`01	`2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%
1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	-	100%
1	`06	`01	`2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	43%

1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	6 Paket	4 Paket	100%	6 Paket	1 Paket	100,00 %
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	100%	12 Paket	1 Paket	48,57 %
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	24 Dokumen	12 Dokumen	100,00 %
1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan /Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100,00 %
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	4 Laporan	100,00 %
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	5 Laporan	1,80%
1	`06	`01	`2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	39%
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	46,88 %
1	`06	`01	`2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	38%

1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	146 Laporan	191 Laporan	100 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	10,68 %
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	10,00 %
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	36,48 %
1	`06	`01	`2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	42%
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	8 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	2,56%
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	6 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	28,21 %
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	5 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100,00 %

1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	1,22%
1	`06	`02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang Tersalurkan	-	82,07%	100,00%	97,66%	97,66 %	100,00%	100,00%	100,00 %
						Persentase PSKS yang Aktif	-	90,83%	87,00%	100,00%	100%	89,00%	89,00%	100,00 %
						Persentase PPKS Yang Diberdayakan	100%	-	-	-	-	-	-	-
1	`06	`02	`2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	-	90,83%	100,00%	100,00%	100%	89%	89%	100%
						Jumlah Kelembagaan Sosial Yang Aktif	88 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	108 Orang	108 Orang	108 Orang	100%	108 Orang	93 Orang	22,79 %
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100%	4 Orang	4 Orang	25,00 %

1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	126 KPM	10.281 KPM	1.875 KPM	1.228 KPM	100%	2.954 KPM	796 KPM	3,06%
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	6 Lembaga	6 Lembaga	30,00 %
1	06	02	2.03	00014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1	06	02	2.03	00016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1	`06	`04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS Yang Tertangani	9,50%	9,20%	9,20%	12,79%	100%	9,20%	TB IV	16,67 %

1	`06	`04	`2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	81%	35,62%	80%	87,14%	100%	9,20%	TB IV	5,96%
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	120 Orang	120 Orang	62 Orang	51,67 %	50 Orang	14 Orang	6,36%
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	24 Orang	100%	20 Orang	13 Orang	32,50 %
1	`06	`04	`2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial*	40%	35,62%	35,62%	59,76%	100%	9,20%	TB IV	19,91 %
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	100%	38 Orang	-	0,00%

1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	25 Orang	20 Orang	10 Orang	50%	25 Orang	19 Orang	100,00 %
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	2650 Orang	1657 Orang	1440 Orang	1702 Orang	84,61 %	1657 Orang	500 Orang	7,67%
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Orang	25 Orang	25 Orang	5 Orang	20%	25 Orang	12 Orang	9,60%
1	`06	`05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang di update	-	1,85%	3,31%	11,72%	100%	1,40%	TB IV	34,48 %
						Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	64%	-	-	-	-	-	-	-
1	`06	`05	`2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase DTKS yang di update*	-	2,90%	3,31%	11,72%	100%	1,40%	TB IV	0,00%
						Jumlah Kelompok Rentan Menerima Bantuan	42.371 KPM	-	-	-	-	-	-	-
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	-	6.452 KPM	6.452 KPM	3.945 KPM	61,14 %	45.495 KPM	605 KPM	9,38%

						Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	515 Usulan	-	-	-	-	-	-	-
1	06	05	2.02	0002	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1315 Orang	7.629 KPM	1.989 KPM	1.504 KPM	75,62 %	692 KPM	137 KPM	1,80%
1	06	05	2.02	0002	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	4.684 KPM	4.288 KPM	602 KPM	14,04 %	1.467 KPM	-	0,00%
1	`06	`06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	100%	57%	60%	100%	100%	63%	100%	100%
1	`06	`06	`2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar*	100%	55%	60%	100%	100%	63%	100%	100%
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000 Orang	12.000 Orang	12.000 Orang	5.850 Orang	100%	12.000 Orang	3.000 Orang	100%

1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	78 Orang	78%	100 Orang	-	-
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	4 Unit	-	-
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	-	50 Orang	-	-
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	21 Orang	25 Orang	-	-	25 Orang	-	-
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase taruna siaga bencana yang aktif*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	61 Orang	48 Orang	48 Orang	100%	48 Orang	46 Orang	100%

1	`06	`07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	`06	`07	`2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam	211 Makam	254 Makam	254 Makam	100%	254 Makam	257 Makam	100%

2.2 Pokok-pokok Materi Yang Disajikan dalam Bab Ini

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 ini dapat kita lihat evaluasi pelaksanaan Dinas Sosial Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Sosial pada Tabel 2.1 Adapun realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi dan melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak memenuhi target dikarenakan adanya kegiatan yang capainnya kurang dari 100%, sehingga memengaruhi capaian program
    2. Program Pemeberdayaan Sosial yang tidak memenuhi realisasinya tercapai 97% dari target 100%. Ketidaktercapaian ini dikarenakan data jumlah bantuan sosial yang tersalurkan sesuai dengan ketentuan dapat didistribusikan kepada penerima manfaat.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
    1. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kedua yaitu persentase PSKS yang aktif terealisasi 100% dari target 100%. Capaian ini berdasarkan data updating PSKS yang aktif tahun 2024.
    2. Program Penanganan bencana yang terealisasi 100% dari target berdasarkan kegiatan Perlindungan dan sosial korban bencana alam dan sosial dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Capaian ini berdasarkan data jumlah korban bencana alam yang tertangani dan kesiapsiagaan dan keaktifan taruna siaga bencana.
    3. Program Pengelolaan Taman Makam Pajlawan dengan capaian 100% karena didukung oleh jumlah cakupan pemeliharaan TMP sejumlah 254 makam.
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
    1. Program Rehabilitasi Sosial terealisasi 12,79% dari target 9,2% Ketercapaian ini didukung oleh kegiatan dan bantuan sosial yang ada pada program rehabilitasi sosial.
    2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terealisasi 11,72% dari target 3,31%. Capaian ini berdasarkan jumlah data yang terverifikasi

sebanyak 6.871 data dibanding jumlah data DTKS sebanyak 58.585 data.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

Ketidaktercapaian program pemberdayaan sosial dikarenakan data jumlah bantuan sosial yang tersalurkan sesuai dengan ketentuan dapat diditribusikan kepada penerima manfaar. Jumlah bantuan sosial yang tersalurkan tidak sesuai dengan jumlah target penerima bantuan sosial disebabkan penerima bantuan sosial sudah sejahtera bantuannya dialihkan melalui APBN, KPM meninggal tidak ada ahli waris, mampu dan pindah domisili.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

1. Perlu dilakukan pemantapan serta peningkatan kualitas kinerja terhadap program/kegiatan yang sudah memenuhi target renstra.
2. Perlu dilakukan review renstra Dinas Sosial untuk mendorong peningkatan pencapaian target.

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Mengoptimalkan upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan kinerja agar output tercapai.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan intervensi kegiatan untuk pencapaian output.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Dinas Sosial Kota Pasuruan adalah melaksanakan fungsi sebagai membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Indikator kinerja Dinas Sosial termasuk dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan,

keterukuran, dan ketetapan sasaran. Substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pasuruan

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/NILAI TARGET/STANDAR (IKU, SPM, IKK)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	CATATAN ANALISIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKU											
1.	%PPKS yang Mandiri		5%	5%	5%	15%	n/a	2.35%	2.40%	15,66%		
2.	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar		90%	92%	95%	64%	n/a	98.2%	93.30%	99,88%		
	SPM											
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%		
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%		100%		

	Korban Bencana Kabupaten/Kota								100%			
	LPPD											
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti							55,52%	98,68%	80,39%		
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota							100%	100%	100%		

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pasuruan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penanganan PPKS
    d. Pertumbuhan dengan angka kemiskinan di Kota Pasuruan yang masih tinggi berimplikasi pada berkembangnya PPKS
    e. Peningkatan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4. Pemberdayaan PPKS
    a. Optimaliasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
    b. Pemberian Bantuan Modal kepada PPKS
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS
    a. Pemberian perlindungan dan jaminan Kesehatan melalui bantuan sosial seperti BPNT, PKH, Sembako, PBIN, dll.
    b. Menyiapkan kesiapsiagaan Masyarakat dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial

2.5 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada sub bagian ini proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik dalam kuantitas kegiatan maupun besaran anggaran yang direncanakan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan sebagai dasar untuk menelaah dan mengevaluasi program dan kegiatan yang diusulkan dengan mempertimbangkan program/kegiatan

pada tahun sebelumnya, usulan mana yang merupakan skala prioritas dan besar anggaran yang dibutuhkan dalam kerangka efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan yang tepat sesuai pada sasaran.

Perbandingan program/kegiatan berdasarkan dokumen rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Pasuruan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 19.011.750.085	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp 18.287.103.461	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp 19.011.750.085	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 4.854.516.262	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 4.992.121.264	
								Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3		
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,5		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Rp 34.151.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	13 Dokumen	Rp 34.151.900	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp 28.598.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 28.598.100	

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 2.866.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 2.866.100	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 2.686.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 2.686.700	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 3.816.755.078	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	Rp 3.962.345.338	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	Rp 3.785.154.978	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	Rp 3.930.745.238	

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Rp 31.600.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Rp 31.600.100	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 44.328.900	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun dalam 1 tahun anggaran	4 Laporan	Rp 44.327.800	
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 44.328.900	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 44.327.800	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 4.082.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 Dokumen	Rp 4.082.000	

1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Rp 4.082.200	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Rp 4.082.200	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Persentase terpenuhinya layanan Administrasi perkantoran	100%	Rp 149.707.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Rp 149.700.100	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 10.007.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 9.994.800	
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 6.788.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 6.788.700	
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Rp 2.407.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.407.200	

4.	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pasuruan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.000.000	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 8.465.900	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 8.444.700	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 112.038.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 112.064.700	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 97.477.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	12 Unit	Rp 96.872.800	
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 97.477.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Rp 96.872.800	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 350.682.084	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	Rp 344.744.726	

1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 500.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 111.457.534	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 111.457.076	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 238.724.550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 232.878.650	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 357.332.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pasuruan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	40 Unit	Rp 355.897.600	

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Rp 42.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Rp 42.370.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 164.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 169.250.000	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 14.712.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Rp 14.379.600	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 136.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 129.880.000	
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase PPKS Yang Diberdayakan	100%	Rp 6.519.556.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase PPKS Yang Diberdayakan	100%	Rp 3.190.609.100	

1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kelembagaan Sosial Yang Aktif	88 Lembaga	Rp 6.519.556.600	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kelembagaan Sosial Yang Aktif	88 Lembaga	Rp 3.190.609.100	
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1875 Keluarga	Rp 4.315.064.600	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	868 Keluarga	Rp 619.264.200	
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	Rp 1.516.886.800	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	Rp 1.830.615.500	

3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	108 Orang	Rp 654.084.900	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang	Rp 676.415.900	
4.	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kota Pasuruan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	4 Laporan	Rp 33.520.300	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kota Pasuruan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	Rp 64.313.500	
III.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,50%	Rp 1.505.348.540	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,50%	Rp 1.498.935.900	

1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	81%	Rp 262.673.700	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	80%	Rp 256.261.800	
1.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 206.442.300	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	Rp 206.442.300	
2.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 49.819.500	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 49.819.500	

2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial	40%	Rp 1.242.674.840	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pasuruan	Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial	40%	Rp 1.242.674.100	
1.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Orang	Rp 20.938.400	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	Rp 20.938.200	
2.	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 218.808.300	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 218.808.000	

3.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	1440 Orang	Rp 909.233.340	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pasuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	2650 Orang	Rp 909.233.100	
4.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Rp 93.694.800	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Orang	Rp 93.694.800	
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	64%	Rp 57.482.284.483	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pasuruan	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	64%	Rp 8.307.981.397	
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Rentan Menerima Bantuan	42.371 Orang	Rp 57.482.284.483	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Kelompok Rentan Menerima Bantuan	41.374 Orang	Rp 8.307.981.397	

1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	6452 Usulan	Rp 208.016.100	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	515 Usulan	Rp 208.016.100	
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1989 Orang	Rp 1.493.130.200	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pasuruan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	505 Orang	Rp 4.052.827.114	
3.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4288 Orang	Rp 4.047.138.183	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pasuruan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1472 Orang	Rp 4.047.138.183	

V.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan	Persentase Korban bencana yang tertangani	100%	Rp 301.479.800	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pasuruan	Persentase Korban bencana yang tertangani	100%	Rp 249.279.500	
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	100%	Rp 98.138.800	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	100%	Rp 98.138.600	
1.	Penyediaan Makanan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000 Orang	Rp 60.764.300	Penyediaan Makanan	Kota Pasuruan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000 Orang	Rp 60.764.100	

2.	Penyediaan Sandang	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 6.411.900	Penyediaan Sandang	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 6.411.900	
3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Rp 3.852.600	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pasuruan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Rp 3.852.600	
4.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 3.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 3.000.000	

5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 24.110.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pasuruan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 24.110.000	
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	100%	Rp 203.341.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	100%	Rp 151.141.000	
1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	Rp 203.341.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pasuruan	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	Rp 151.141.000	
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 88.976.300	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Pasuruan	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 48.176.200	

1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 88.976.300	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 48.176.200	
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	255 Makam	Rp 88.976.300	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pasuruan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam	Rp 48.176.200	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan kedalam 8 prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan 8 agenda pembangunan diatas, maka terdapat 1 (satu) Prioritas Nasional yang terkait dengan Urusan Sosial yaitu nomer 6 : “Membangun dari desa dan dari bawah untuk perumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2026 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Untuk tahun 2026 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Berlandaskan penetapan tema pembangunan tahun 2026 nasional tersebut, kemudian dipetakan menjadi fokus pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Kedaulatan Pangan dan Energi;
2. Mendorong Ekonomi yang Produktif dan Inklusif; dan
3. Memperkuat Pemerataan dan Pembangunan Wilayah.

Pertimbangan selanjutnya dalam menentukan tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026 ialah dengan mempertimbangkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur. Merujuk terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi”.

Untuk dapat memberikan fokus terhadap pembangunan pada tahun tersebut, maka diturunkanlah kedalam 9 prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
2. Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
3. Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
5. Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan
6. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
7. Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
9. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Pasuruan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Pasuruan yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tahun 2026, merupakan tahun Pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, yang mengusung visi pembangunan sebagai berikut:

PASURUAN ANUGRAH

“Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya”

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita visi Pasuruan Kota Madinah kemudian dituangkan dalam empat misi yang diuraikan sebagai berikut:

MISI I Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Merata Berbasis Digital;

MISI II Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul melalui akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkualitas;

MISI III Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;

MISI IV Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berorientasi pada peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial; dan

MISI V Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui penguatan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Adapun tema pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026 adalah

“Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Sosial Yang Harmoni Dan Berkelanjutan”

Selanjutnya sebagai upaya untuk memberikan fokus terhadap capaian tematik pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026, kemudian tema tersebut diturunkan kedalam 6 (enam) prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2026 yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat Pembangunan SDM yang berkarakter
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Penunjang Perekonomian
3. Stimulus Daya Tarik Investasi
4. Menumbuhkan Perekonomian sektor Unggulan
5. Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik
6. Meningkatkan Harmonisasi Sosial
7. Pengurangan Kemiskinan
8. Sarpras Pendidikan dan kesehatan berkualitas

Adapun matriks Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Meningkatnya PPKS Yang Mandiri	Persentase PPKS Yang Mandiri	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Dinas Sosial dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan harapan terjadinya sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026, dimana perumusan tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan harus *computable* agar upaya pertanggungjawabannya dapat tercapai secara objektif dan terukur. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan Dinas Sosial

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	%PPKS Yang Mandiri	15.45%

Untuk mendukung tujuan tersebut, kemudian sasaran Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.3 Sasaran Dinas Sosial

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	65.9%

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama PD
1	Meningkatkan Kemandirian PPKS	%PPKS Yang Mandiri	15.45%
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	%PPKS Yang Terakses Layanan Sosial Dasar	65.9%

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana serta penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya yang diampu oleh Dinas Sosial.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Berikut 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penanganan Bencana

Kegiatan dan sub kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 5 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2026 adalah sebanyak 15 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pasuruan pada tahun 2026 adalah sebanyak 41 sub kegiatan, yang terdiri dari 21 sub kegiatan penunjang, dan 20 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 2026 adalah sebesar Rp. Rp18.287.103.461,- yang bersumber dari dana APBD Kota Pasuruan.

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pasuruan

Kode					Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp 18.287.103.461,00							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp 18.287.103.461,00							
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	Rp 4.992.121.264,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
						Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	3								
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,5								

1	`06	`01	`2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai ketentuan	13 Dokumen	Rp 34.150.000,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	Rp 26.827.100
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 28.598.100,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 22.325.100
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 2.866.100,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp 2.250.000

1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 2.686.700,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 2.252.000
1	`06	`01	`2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	Rp 2.962.345.338,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp3.862.345.338
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	Rp 3.930.745.238,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Orang/Bulan	Rp3.930.745.238

1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Rp 31.600.100,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Laporan	Rp 31.600.100
1	`06	`01	`2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun dalam 1 tahun anggaran	4 Laporan	Rp 44.327.800,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 40.250.000
1	06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 44.327.800,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 40.250.000

1	`06	`01	`2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 Dokumen	Rp 4.082.000,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 4.081.000
1	06	01	2.05	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Rp 4.082.000,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 4.081.000
1	`06	`01	`2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	4 Laporan	Rp 149.700.100,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	

1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 9.994.800	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Paket	Rp 9.625.250
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 6.788.700	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	Rp 6.677.500
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 2.407.200	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp 2.407.200

1	6	1	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.000.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	Rp 10.000.000
1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 8.444.700	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 8.350.000
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 112.064.700	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Rp 87.632.500

1	`06	`01	`2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	12 Unit	Rp 96.872.800,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Peralatan dan Mesin Yang Disediakan	100%	Rp 50.250.000
1	06	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Rp 96.872.800	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Peralatan dan Mesin Yang Disediakan	12 Unit	Rp 50.250.000
1	`06	`01	`2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	Rp 344.744.726,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Jasa penunjang urusan pemerintahan	4 Laporan	Rp 337.607.831

1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 500.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	Jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	Rp 500.000
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 111.457.076	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	Jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	Rp 111.457.076
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 232.787.650	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	Jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Laporan	Rp 225.650.755

1	`06	`01	`2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	40 Unit	Rp 355.897.600,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Barang Milik Daerah yang dipelihara	39 Unit	Rp 283.380.450
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Rp 42.370.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Barang Milik Daerah yang dipelihara	13 Unit	Rp 43.250.000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Rp 169.250.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Barang Milik Daerah yang dipelihara	13 Unit	Rp 169.250.000

1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Rp 14.379.600	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	Barang Milik Daerah yang dipelihara	22 Unit	Rp 12.623.200
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp 129.880.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Unit	Rp 58.257.250
1	06	`02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS Yang Diberdayakan	100%	Rp 3.190.609.100	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	PPKS	100%	Rp6.213.011.801

1	`06	`02	`2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Sosial Yang Aktif	88 Lembaga	Rp 3.190.609.100	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Kelembagaan	88 Lembaga	Rp6.213.011.801
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	868 Keluarga	Rp 619.264.200	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Keluarga Yang Meningkat Kapasitasnya	130 Keluarga	Rp3.384.532.411
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	Rp 1.830.615.500	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya	6 Lembaga	Rp2.013.677.050

1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang	Rp 676.415.900	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	103 Orang	Rp 744.057.490
1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	Rp 64.313.500	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	12 Laporan	Rp 70.744.850

1	`06	`04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang direhabilitasi sesuai tahun dasar	9,50%	Rp 1.498.935.900	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	PMKS Yang Direhabilitasi	10%	Rp1.428.457.732
1	`06	`04	`2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial	80%	Rp 256.261.800	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranganketimpangan kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	82%	Rp 232.871.800

1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	Rp 206.442.300	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranggan ketimpangan kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	90 Orang	Rp 194.747.300
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 49.819.500	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penguranggan ketimpangan kemiskinan	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	65 Orang	Rp 38.124.500

1	`06	`04	`2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Layanan Sosial	40%	Rp 1.242.674.100	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Memperc epat pengentasan kemiskinan dan penguran gan ketimpan gan kemiskinan	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	45%	Rp1.195.585.932
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	Rp 20.938.200	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Memperc epat pengentasan kemiskinan dan penguran gan ketimpan gan kemiskinan	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	90 Orang	Rp 9.243.200
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu, dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 218.808.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Memperc epat pengentasan kemiskinan dan penguran gan ketimpan gan kemiskinan	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	20 Orang	Rp 207.113.000

1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota :	2650 Orang	Rp 909.233.100	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2700 Orang	Rp 897.538.100
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Orang	Rp 93.694.800	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	77 Orang	Rp 81.691.632
1	06	`05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	64%	Rp 8.307.981.397	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurangan ketimpangan kemiskinan	Kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	65%	

1	`06	`05	`2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Rentan Menerima Bantuan	41.374 Orang	Rp 8.307.981.397	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	41.374 Orang	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	515 Usulan	Rp 208.016.100	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	515 Usulan	Rp 303.003.407
1	06	05	2.02	0002	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	505 Orang	Rp 4.052.827.114	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	505 Orang	Rp5.175.000.929

1	06	05	2.02	0002	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1472 Orang	Rp 4.047.138.183	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Kelompok rentan yang mendapatkan jaminan sosial	-	-
1	06	`06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang tertangani	100%	Rp 249.279.500	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	100%	Rp 274.737.363
1	`06	`06	`2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang mendapat layanan kebutuhan dasar	100%	Rp 98.138.600	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	100%	Rp 108.161.037

1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	11.000 Orang	Rp 60.764.100	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	11.000 Orang	Rp 66.969.654
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Rp 6.411.900	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	100 Orang	Rp 7.066.717
1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Rp 3.852.600	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	4 Orang	Rp 4.246.048

1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 3.000.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	50 Orang	Rp 3.306.376
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 24.110.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Korban bencana yang tertangani	50 Orang	Rp 26.572.242
1	`06	`06	`2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana yang aktif	100%	Rp 151.141.000,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Taruna Siaga Bencana	100%	Rp 166.576.326

1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	Rp 151.141.000	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Taruna Siaga Bencana	47 Orang	Rp 166.576.326
1	06	`07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase cakupan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 48.176.200,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Taman Makam Pahlawan	100%	Rp 81.083.755
1	`06	`07	`2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	257 Makam	Rp 48.176.200,00	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Taman Makam Pahlawan	257 Makam	Rp 81.083.755

1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	257 Makam	Rp 48.176.200	Kota Pasuruan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	JATIM SEJAHTERA Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan kemiskinan	Taman Makam Pahlawan	257 Makam	Rp 81.083.755

BAB 5 PENUTUP

Dinas sosial berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial memiliki fungsi berupa penyusunan perencanaan di bidang sosial memiliki wewenang untuk pembinaan, koordinasi, pengendalian serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial.

Output dari tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pasuruan yaitu Program Tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pasuruan sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) sesuai Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022.

Usaha meningkatkan kinerja Dinas Sosial akan terus dilakukan dengan berbagai langkah terpadu dan menyeluruh melalui evaluasi dan perencanaan yang pada akhirnya tertuju pada kepentingan perkembangan Kota Pasuruan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pasuruan Tahun 20256telah disusun dan semoga menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Sosial dan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pasuruan.

Pasuruan, 08 Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial
Kota Pasuruan



Kokoh Arie Hidayat, S.E.,S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197609191996021003